

Berita : Bantuan Pemprov Sia-Sia

Entitas / Cakupan : Kabupaten Garut

Sumber / Hal : Tribun Jabar / Hal.1

Edisi : Selasa, 21 Agustus 2018

Bantuan Pemprov Sia-sia

■ IPAL Senilai Miliaran Rupiah Tak Dipakai

GARUT, TRIBUN - Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa tiga instalasi pengolahan air limbah (IPAL) untuk pengusaha kulit di Sukaregang, Kecamatan Garut Kota, sia-sia. IPAL senilai miliaran rupiah itu sudah sama sekali tak dipergunakan. Pengusaha enggan memanfaatkannya karena masalah regulasi. Mereka menuntut pemprov segera

“Semua harus turun tangan selesaikan itu. Jangan hanya lakukan pertemuan tanpa ada solusinya.”

SUKANDAR
Wakil Ketua Bidang Pemerintahan APKI

hingga miliaran rupiah, sementara tanpa IPAL, perizinan perusahaan penyamakan kulit mereka pasti tidak akan keluar.

Karena mahalnya pembuatan IPAL inilah, kata Teten, rata-rata perusahaan penyamakan kulit di Sukaregang hanya menggunakan pengolahan secara manual di IPAL-nya.

Bantuan Pemprov Sia-sia

■ dari halaman 1

penyulingan seadanya,” ujar Teten di pabrik GMP, Jalan Sudirman, Kelurahan Kota Wetan, Kecamatan Garut Kota, Kamis (16/8).

Teten mengatakan, untuk membangun IPAL-nya, PT GMP harus mengeluarkan tak kurang dari 1,5 miliar. Jumlah itu belum termasuk biaya operasional per bulan sekitar Rp 16,5 juta. “Biaya operasional itu juga baru untuk membeli bahan kimianya. Belum termasuk biaya listrik dan lainnya,” kata Teten.

Meski hasil uji sampel, air yang sudah dioleh di IPAL PT GMP, masih belum jernih, PT GMP sudah bisa kembali memanfaatkannya untuk proses produksi. “Dengan demikian, kami tidak lagi membuang limbah ke sungai.”

Wakil Ketua Bidang Pemerintahan Asosiasi Penyamak Kulit Indonesia (APKI), Sukandar, mengatakan sejauh ini baru PT GMP yang sudah memiliki limbah. Kondisi tersebut, ujarnya, bisa dipahami.

“Karena membuat IPAL memang tak murah. Bisa sampai Rp 700 juta. Ada beberapa pengusaha yang sudah mulai membangun. Ada yang 80, 90 persen sampai 100 persen,” ujar Sukandar di Kantor APKI, Jalan Sudirman.

Sebanyak tiga IPAL yang

dibangun pemerintah, disebut Sukandar, memang tak digunakan. Satu IPAL yang sudah direvitalisasi pun tak beroperasi. “Kami harap pemerintah jalankan IPAL yang ada. Jalankan dulu itu (tiga IPAL yang ada), revitalisasi dan beri hak guna pakai (ke pengusaha). Pengusaha sudah mau pola itu. Sudah disampaikan beberapa kali,” katanya.

Operasional IPAL, nantinya dibebankan ke pengusaha. Pembiayaan akan diatur berdasarkan debit air yang masuk ke IPAL secara berkelompok. Jika Pemkab Garut berat dalam pembiayaan, pihaknya bisa meminta bantuan dari provinsi dan pusat.

“Tinggal daerah berikan surat hak guna pakai itu. Semua harus turun tangan selesaikan itu. Jangan hanya lakukan pertemuan tanpa ada solusinya,” ujarnya.

Selain IPAL, APKI pun telah melakukan normalisasi tiga sungai yang tercemar, yakni Sungai Cigulampeng, Ciwalen, dan Cikendi. Ketiga sungai itu melintasi lima kelurahan yakni Kota Wetan, Regol, Sukamentri, Ciwalen, dan Suci Kaler.

“Kami juga berikan kompensasi ke setiap RW yang terimbas limbah. Pemberian kompensasi setiap tiga bulan sekali. Itu masih berjalan sampai sekarang,” katanya.

Kepala DLH Kabupaten Garut, Asep Suparman, mengatakan masalah IPAL bantuan pemprov ini masih terus

mereka bahas dengan para pengusaha melalui asosiasi. DLH, ujarnya, sudah beberapa kali melaksanakan pertemuan dengan pengusaha.

Ia berharap ada realisasi setiap pengusaha dalam menyediakan IPAL. “Sudah beberapa kali mereka nyatakan kesanggupan. Tapi, sampai sekarang tak ada. Masalah IPAL di Sukaregang belum tuntas,” ujarnya di Fave Hotel, Jalan Cimanuk, Kamis (16/8).

Bupati Garut Rudy Gunawan mengancam akan mencabut izin perusahaan pengolahan kulit di wilayah Sukaregang yang tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Rudy mengatakan, bila pemilik perusahaan pengolahan kulit enggan membangun IPAL, sanksi tegasnya berupa pencabutan izin usaha. “IPAL itu adalah kewajiban yang harus dibuat oleh semua perusahaan,” kata Rudy di Kantor Setda Pemerintah Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan, Kabupaten Garut, Senin (20/8/2018).

Rudy mengatakan, seluruh perusahaan pengolahan kulit di wilayah Sukaregang, semuanya menghasilkan limbah berbahaya dan beracun (B3) yang akan mengancam keberlangsungan lingkungan, terutama aliran sungai. “Bila dibiarkan, masyarakat akan terdampak dan menjadi rugi,” katanya. (firman wijaksana/hakim baihaki)